

Kontribusi Faktor-Faktor Pendorong Terhadap Penerapan PROPER di Perusahaan Pengolahan Kelapa Sawit di Propinsi Riau

Rosita Erliwahyuni Siregar¹, Aslim Rasyad², Syaiful Hadi²

¹Staf Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jl. HR. Soebrantas KM.10,5 Pekanbaru Telp.0761-62962

²Fakultas Pertanian Universitas Riau Kampus Bina widya Panam KM 12.5 Pekanbaru

Abstract: *The objective of this study was to describe the implementation of Company Environmental Performance Programme (PROPER) on palm oil processing company in Riau Province and to analyze the effect of determining factors such as the announcement of company performance in the mass media, banking factor, global market demands, legal sanctions and the company's commitment to the implementation of the PROPER. Samples were selected at purposive random from palm oil processing plants located in Riau province which participated in PROPER in the year of 2013-2014. Data analysis were performed by multiple linear regression. The result shows that there was significant influence of the variables of the announcement in the mass media, banking factor, global market demands, legal sanctions and the company's commitment to environmental performance (PROPER). Variation of the independent variables (announcement in the mass media, banking factor, global market demands, legal sanctions and company's commitment) could explain only 36.1% of the dependent variable (PROPER) while the remaining 63.9% is explained by other variables. Analysis of single determinant such as announcement in the mass media and global market demands has nonsignificantly positive effect on the environmental performance (PROPER). While the smooth provision of credit by banks and legal sanctions has nonsignificantly negative effect on the environmental performance (PROPER). On the other hand, the company's commitment in managing the environment has significant positive effect to the environmental performance (PROPER).*

Key Words : PROPER, Palm Oil Processing Company

Kelapa Sawit sebagai salah satu komoditi perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Selain sebagai salah satu penghasil devisa negara, kelapa sawit juga bersifat padat karya sehingga banyak menyerap tenaga kerja. Potensi komoditi kelapa sawit Indonesia dilihat dari sisi komparatif sebenarnya memiliki prospek yang baik, karena iklim serta cuaca Indonesia yang cocok untuk budidaya kelapa sawit. Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2012 menduduki peringkat pertama terluas di dunia dengan luas lebih dari 9, 5 juta hektar.

Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 1967 luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia hanya seluas 105.808 ha saja, sementara pada tahun 2014 luasnya telah

melebihi 10 juta hektar. Peningkatan jumlah industri sektor pertanian (agroindustri) juga berkembang pesat terutama industri pengolahan kelapa sawit (PKS). Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan mencatat bahwa total industri PKS di Propinsi Riau meningkat dari 44 tahun 2001 menjadi 227 buah pada 2015. Selain itu, sektor perkebunan menyumbang PDRB tanpa migas terhadap sektor pertanian di Propinsi Riau tahun 2008-2012 sebesar 50%. Sedangkan sektor pertanian memberikan kontribusi rata-rata sebesar 32% terhadap perekonomian Riau pada tahun 2008-2012.

Pesatnya Perkembangan industri pada umumnya dan industri pengolahan kelapa sawit pada khususnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat tanpa merusak lingkungan. Tetapi, pada kenyataannya laju pembangunan tidak sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan. Fakta

lapangan menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum memiliki dokumen lingkungan, yang membuang air limbah dan emisinya melebihi baku mutu yang diperbolehkan, belum mengelola seluruh limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkannya. Untuk itu, perlu program penataan lingkungan yang dapat mendorong para pelaku usaha untuk menaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan dan melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik dan bertanggung jawab.

Untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh perusahaan PKS tersebut, dikeluarkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan berbagai program penyelamatan lingkungan. Akan tetapi, regulasi dan program yang ada tidak cukup efektif untuk menjaga kualitas dan fungsi lingkungan. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif dan instrumen yang mampu menghambat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut, salah satunya adalah PROPER. Sebagai instrumen penataan alternatif yang berbeda dengan instrumen penataan lainnya maka perlu diteliti faktor-faktor apa yang mendorong perusahaan untuk menerapkan PROPER dengan baik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan PROPER pada perusahaan pengolahan kelapa sawit di Propinsi Riau dan mengetahui pengaruh pengumuman di media massa, faktor perbankan, tuntutan pasar global, sanksi hukum dan komitmen perusahaan terhadap penerapan PROPER.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilakukan pada beberapa perusahaan pengolahan kelapa sawit (PKS) penghasil *Crude Palm Oil* (CPO) yang beroperasi di kabupaten/kota yang ada di Propinsi Riau. Perusahaan PKS yang diteliti adalah perusahaan peserta PROPER tahun 2013 – 2014 di Propinsi Riau. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2014.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, dimana sampel ditentukan secara *random sampling* dari

perusahaan pengolahan kelapa sawit penghasil CPO di Propinsi Riau yang menerapkan PROPER tahun 2013 – 2014. Perusahaan sampel yang terpilih diminta untuk menjawab kuesioner yang disampaikan, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara statistik dan dibahas secara deskriptif.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara dengan perusahaan mengenai pendapat dan persepsi mereka terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk menerapkan PROPER dan penilaian sendiri terhadap kinerja lingkungannya. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Sumatera, dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Riau. Data tersebut meliputi hasil penilaian terhadap peserta PROPER sampai dengan tahun 2014, perkembangan kriteria, mekanisme dan sistem penilaian PROPER, serta publikasi hasil penilaian PROPER.

Pengukuran variabel bebas dan terikat dilakukan dengan menggunakan skala *likert*. Hasil pengukuran yang diperoleh merupakan data yang bersifat ordinal. Data ordinal dapat diperlakukan seperti data interval setelah melalui proses transformasi data. Transformasi data menggunakan Metode Suksesif Interval (MSI) (Sarwono dalam Kasman, 2013). Sebelum data dianalisis lebih lanjut, dilakukan uji instrumen terlebih dahulu, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini nilai validitas butir pernyataan diukur berdasarkan nilai korelasi *product moment* dari *pearson*. Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung koefisien alpha, dikatakan reliabel apabila nilai alpha yang diperoleh lebih besar dari 0,600 (Ghozali, 2005).

Metode analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran pelaksanaan PROPER pada perusahaan pengolahan kelapa sawit di Propinsi Riau melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2007). Bahasan deskriptif terkait karakteristik dan tanggapan responden

terhadap butir-butir pernyataan dalam kuesioner. Analisis deskriptif dilakukan melalui penghitungan frekuensi, persentase dan rata-rata distribusi jawaban responden kemudian dilakukan pengkategorian kedalam skala kategori. Skala kategori ditetapkan dengan menghitung skor tertinggi dikurangi dengan skor terendah dibagi jumlah kategori dengan interval kategori sebesar 0,8, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategori Skor Berdasarkan Kategori Jawaban Responden

No	Skala Kategori Jawaban	Kategori
1.	1,00 – 1,80	Sangat rendah
2.	1,81 – 2,60	Rendah
3.	2,61 – 3,40	Sedang
4.	3,41 – 4,20	Tinggi
5.	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Sumber : Sugiyono, 2007.

Analisis inferensial dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah PROPER (Y), sedangkan variabel bebasnya adalah pengumuman di media massa (X1), faktor perbankan (X2), tuntutan pasar global (X3), sanksi hukum (X4) dan komitmen perusahaan (X5). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penggunaan model analisis regresi terikat dengan sejumlah asumsi dan harus memenuhi asumsi-asumsi klasik yang mendasari model tersebut. Sebelum dilakukan analisis linier berganda dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedstisitas.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan nilainya (Sugiyono, 2008). Analisis ini digunakan untuk mengetahui kuatnya hubungan antara pengumuman di media massa, faktor perbankan, tuntutan pasar global, sanksi hukum dan komitmen perusahaan dengan PROPER (kinerja lingkungan) dengan rumus : $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5$. Selanjutnya untuk menguji apakah ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan dilakukan uji F. Selain itu, uji parsial dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Selanjutnya untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi peubah dependen dijelaskan oleh semua peubah independen akan dianalisis melalui nilai koefisien determinasi (R^2). Analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS.

HASIL

Analisis Deskriptif. Perusahaan PKS yang ada di Propinsi Riau selama 5 tahun terakhir umumnya memperoleh peringkat biru. Tahun 2013-2014 dari 88 perusahaan yang dinilai 6 perusahaan meraih peringkat hijau (6,8%), 64 perusahaan (72,7%) berperingkat biru dan 18 perusahaan berperingkat merah (20,5%), dan tidak ada yang berperingkat hitam. Jumlah Perusahaan PKS Peserta PROPER di Propinsi Riau Tahun 2009 – 2014 dan peringkatnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Perusahaan PKS Peserta PROPER di Propinsi Riau Tahun 2009 – 2014 dan Peringkatnya

Tahun	Jl h	Peringkat				
		Em as	Hijau	Bir u	Mera h	Hita m
2009	– 18	-	-	14	4	-
2010	– 22	-	-	15	6	1
2011	– 39	-	2	31	6	-
2012	– 93	-	-	65	28	-
2013	– 88	-	6	64	18	-
2014						

Sumber : KLH RI, (2010 – 2014)

Tabel 3. Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel Penelitian

No.	Variabel	Skala	Kategori
1.	Pengumuman di Media Massa	4,34	Sangat Tinggi
2.	Faktor Perbankan	3,81	Tinggi
3.	Tuntutan Pasar Global	3,81	Tinggi
4.	Sanksi Hukum	4,32	Sangat Tinggi
5.	Komitmen Perusahaan	4,43	Sangat Tinggi
6.	Kinerja Lingkungan (PROPER)	4,58	Sangat Tinggi

Sumber : Data primer, 2015

Tanggapan responden terhadap variabel penelitian diuraikan sebagai berikut :

Pengumuman di Media Massa.

Perusahaan responden mayoritas menjawab setuju terhadap variabel pengumuman di media massa. Nilai rata-rata variabel adalah 4,34 yang berada pada kategori sangat tinggi (nilai rata-rata antara 4,21 – 5,00).

Faktor Perbankan.

Perusahaan responden umumnya menjawab setuju terhadap variabel faktor perbankan. Nilai rata-rata variabel sebesar 3,81 yang berada pada kategori tinggi (nilai rata-rata antara 3,41 s/d 4,20), sebagian besar perusahaan menilai variabel faktor perbankan merupakan variabel yang penting.

Tuntutan Pasar Global.

Jawaban responden terhadap variabel tuntutan pasar global menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,81 berada pada kategori tinggi (nilai rata-rata antara 3,41 s/d 4,20). Sebagian besar perusahaan menilai penting pada variabel tuntutan pasar global.

Sanksi Hukum.

Perusahaan responden mayoritas menjawab setuju terhadap variabel sanksi hukum. Nilai rata-rata variabel adalah 4,32 yang berada pada kategori sangat tinggi (nilai rata-rata antara 4,21 – 5,00). Sebagian besar perusahaan mempersepsikan sangat baik pada variabel sanksi hukum.

Komitmen Perusahaan.

Nilai rata-rata variabel sebesar 4,43 yang berada pada kategori sangat tinggi (nilai rata-rata antara 4,21 – 5,00).

Kinerja Lingkungan (PROPER).

Perusahaan responden mayoritas menjawab sangat setuju terhadap variabel PROPER. Nilai rata-rata variabel sebesar 4,58 yang berada pada kategori sangat tinggi (nilai rata-rata antara 4,21 – 5,00). Seluruh indikator pada variabel PROPER dianggap sangat penting oleh perusahaan.

Analisis Inferensial

Uji Instrumen.

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap 41 pernyataan ditemukan semua pernyataan valid karena r hitung lebih besar dari r tabel, Demikian juga dengan uji reliabilitas berdasarkan pendekatan konsistensi internal. diperoleh nilai koefisien *alpha* sebesar 0,970 lebih besar dari 0,600

sehingga kuesioner dinyatakan reliabel dan dapat digunakan secara berulang-ulang.

Uji Asumsi Klasik.

Hasil uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua asumsi klasik terpenuhi, sehingga analisis regresi dapat dilanjutkan.

Analisis Regresi.

Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan diperoleh persamaan sebagai berikut : $Y = 0,547 + 0,053X_1 - 0,227X_2 + 0,428X_3 - 0,009X_4 + 0,443X_5$

Hasil pengujian secara simultan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.102	5	2.020	4.406	.0028 ^a
	Residual	17.884	39	.459		
	Total	27.986	44			

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X1, X4, X2

b. Dependent Variable: Y1

Hasil uji menunjukkan F hitung sebesar 4,41 dengan tingkat signifikansi 0,0028. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis yang menyatakan bahwa variabel pengumuman di media massa, faktor perbankan, tuntutan pasar global, sanksi hukum dan komitmen perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan (PROPER) dapat dibuktikan secara statistik.

Besarnya variasi variabel bebas menerangkan variabel terikat disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.601 ^a	.361	.279	.6771782312	.361	4.406	5	39	.0028

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X1, X4, X2

Hasil analisis statistik menunjukkan nilai R Square sebesar 0,3610 atau 36,1% (Tabel 5). Besarnya variasi variabel pengumuman di

media massa, faktor perbankan, tuntutan pasar global, sanksi hukum dan komitmen perusahaan untuk menerangkan variabel PROPER sebesar 36,1% sedangkan sisanya 63,9% diterangkan oleh variabel lain.

Hasil uji parsial pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Uji t

		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.547	.565		.969	.338
	X1	.053	.157	.050	.335	.740
	X2	-.227	.217	-.206	-1.047	.302
	X3	.428	.173	.466	2.477	.018
	X4	-.009	.176	-.008	-.051	.960
	X5	.443	.172	.443	2.579	.014

a. Dependent Variable: Y1

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel pengumuman di media massa sebesar $0,335 < t \text{ tabel} = 2,0176$ dengan probabilitas sebesar 0,7397 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengumuman di media massa berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja lingkungan (PROPER).

Uji t untuk variabel perbankan diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,3016 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa faktor perbankan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja lingkungan (PROPER). Uji t untuk variabel tuntutan pasar global diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0177 lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya tuntutan pasar global berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja lingkungan (PROPER). Uji t untuk variabel sanksi hukum diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,9598 lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya bahwa sanksi hukum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja lingkungan (PROPER). Perusahaan dengan peringkat merah dua kali berturut-turut pada aspek yang sama atau hitam akan dikenakan sanksi hukum. Uji t untuk variabel

komitmen perusahaan diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0138 lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya bahwa komitmen perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap PROPER.

PEMBAHASAN

Tanggapan Responden terhadap Variabel Penelitian

Variabel Pengumuman di Media Massa. Sebagian besar perusahaan menilai variabel pengumuman di media massa sangat penting. Pengungkapan informasi peringkat PROPER secara nasional, bahkan juga dilansir oleh media massa lokal, akan membangun pencitraan dan membentuk opini masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Nilai rata-rata indikator tertinggi atau dianggap paling penting adalah “pengumuman di media massa berpengaruh terhadap citra perusahaan di mata publik”. Perusahaan berperingkat emas dan hijau memperoleh pencitraan yang baik, sebagai perusahaan yang ramah lingkungan. Masyarakat akan memberikan penghargaan positif, sebaliknya perusahaan dengan peringkat merah dan hitam akan memperoleh citra kurang baik di mata publik. Berdasarkan wawancara dengan perusahaan sampel, perusahaan tersebut merasa malu baik dalam tingkat asosiasi maupun pada kalangan yang lebih luas. Terlebih lagi kalau peringkat merah tersebut diakibatkan oleh ketidaktaatan pada aspek pengelolaan limbah B3.

Jawaban responden menunjukkan indikator yang paling rendah adalah “pengumuman di media massa bisa menjadi insentif/disinsentif reputasi bagi perusahaan”. Perusahaan beranggapan bahwa pengumuman di media massa saja tidak cukup untuk insentif reputasi bagi perusahaan. Perusahaan berharap bentuk *reward* yang diberikan tidak hanya berupa pengumuman di media massa, tetapi juga dalam bentuk ekonomi. Perusahaan adalah bisnis yang sangat memperhatikan keuntungan (profit). Sisi ekonomis, perusahaan berharap ada pengurangan pajak atau bea masuk impor barang-barang pengendalian pencemaran bagi perusahaan yang berperingkat hijau dan emas. Sebaliknya, bagi perusahaan yang berperingkat merah dan hitam diberikan disinsentif reputasi

yang lebih dari hanya sekedar pengumuman di media massa, misalnya penetapan denda dan pemberian sanksi.

Faktor Perbankan. Perusahaan sangat erat kaitannya dengan jasa perbankan. Pengembangan dan keberlanjutan usaha tidak terlepas dari ketersediaan anggaran, sehingga pinjaman modal menjadi salah satu aspek yang penting bagi perusahaan dan kelancaran kredit sangat mendukung kemajuan suatu usaha. Oleh karena itu, perusahaan menilai indikator “peringkat biru, hijau, dan emas dapat mempengaruhi kelancaran kredit” sebagai indikator yang paling penting.

Indikator terendah adalah “surat edaran Bank Indonesia No. 7/3DPNP tanggal 31 Januari 2005 yang mengaitkan peringkat PROPER dengan penilaian kualitas aktiva bank umum penetapan kualitas kredit bisa dimanfaatkan perusahaan”. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh bank yang terhubung dengan penilaian PROPER masih terbatas jumlahnya, yaitu hanya 3 bank. Sementara itu, perusahaan responden seluruhnya menggunakan jasa bank selain ketiga bank tersebut.

Tuntutan Pasar Global. Salah satu kriteria peserta PROPER adalah perusahaan yang produknya berorientasi ekspor, termasuk perusahaan PKS yang menjadi sampel penelitian. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan sampel sebagian besar akan dijual ke pasar internasional. Pasar global mempersyaratkan produk-produk yang ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan tanggapan responden bahwa “produk yang ramah lingkungan lebih diterima pasar global dan ini dikaitkan konsumen dengan peringkat PROPER produsen” sebagai indikator tertinggi. Indikator terendah yaitu “konsumen global menjadikan peringkat PROPER sebagai salah satu pertimbangan pembelian produk. Peringkat PROPER belum dicantumkan secara eksplisit pada label produk. Sehingga informasi perolehan peringkat PROPER tidak sampai kepada konsumen global secara langsung.

Sanksi Hukum. Tanggapan responden terhadap variabel sanksi hukum menunjukkan bahwa Nilai rata-rata indikator tertinggi adalah indikator “PROPER efektif untuk mendorong perusahaan lebih taat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan

hidup”. Perusahaan beranggapan bahwa PROPER dapat dijadikan sebagai instrumen penataan alternatif. Keikutsertaan perusahaan dalam PROPER membuat perusahaan lebih memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Indikator paling rendah adalah “perusahaan percaya bahwa apabila peringkat PROPER merah 2 kali berturut-turut atau hitam akan dikenakan sanksi hukum”. Kementerian Lingkungan Hidup mengklaim bahwa perusahaan dengan peringkat merah 2 kali berturut-turut pada aspek yang sama atau hitam akan diserahkan kepada mekanisme penegakan hukum. Responden beranggapan bahwa mekanisme ini belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga responden menilai indikator ini lebih rendah dibanding indikator lainnya.

Komitmen Perusahaan. Komitmen perusahaan sangat penting karena dengan adanya komitmen maka perusahaan akan lebih peduli dan bersedia untuk mengikuti aturan yang ditetapkan. Komitmen yang tinggi menggambarkan adanya keinginan untuk memberikan waktu, pekerjaan, energi dan sebagainya untuk memperoleh peringkat PROPER yang lebih baik. Nilai rata-rata jawaban responden tertinggi pada indikator “peningkatan komitmen pimpinan perusahaan terhadap lingkungan”. Pimpinan merupakan “*tone of the top*” dalam suatu organisasi, artinya apabila pimpinan menentukan sesuatu maka para manajer dan bagian-bagian yang dibawahnya akan mengikuti arah kebijakan pimpinan tersebut. Apabila pimpinan telah komit terhadap lingkungan, maka perusahaan itu kemungkinan besar akan lebih peduli terhadap aspek lingkungan.

Kinerja Lingkungan. Variabel kinerja lingkungan dipersepsikan sangat tinggi oleh responden yaitu sebesar 4,58 (Tabel 3). Nilai rata-rata indikator tertinggi yaitu “memiliki dokumen lingkungan atau izin lingkungan” dan “melaporkan pelaksanaan izin lingkungan (RKL-RPL/UKL-UPL) kepada instansi yang berwenang”. Dua indikator ini dinilai paling utama oleh perusahaan dibandingkan indikator yang lain. Berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyebabkan

perubahan yang mendasar terkait paradigma dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, atau dokumen lingkungan lainnya). Sebelum UU 32 Tahun 2009 dan PP 27 Tahun 2012 disahkan, tidak ada konsekuensi hukum terhadap dokumen lingkungan. Tetapi setelah berlakunya UU 32 Tahun 2009 tersebut maka setiap pelaku kegiatan wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan terintegrasi dengan dokumen lingkungan. Izin lingkungan menjadi pintu gerbang perizinan lainnya termasuk izin usaha. Apabila izin lingkungan dicabut, maka izin usaha akan batal demi hukum.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.

Hasil analisis menjelaskan bahwa dua variabel yang dominan mendorong penerapan PROPER pada perusahaan pengolahan kelapa sawit di Propinsi Riau yaitu tuntutan pasar global dan komitmen perusahaan. Kedua variabel ini signifikan meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan variabel pengumuman di media massa, faktor perbankan dan sanksi hukum tidak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Apabila tiga variabel dimaksud tidak ditingkatkan oleh KLH sebagai penyelenggara PROPER maka program penilaian ini tidak memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kinerja lingkungan para pelaku usaha. Penyebarluasan peringkat PROPER harus lebih ditingkatkan, tidak hanya di media elektronik tetapi juga di media massa baik nasional maupun internasional. Selain itu, perlu kerja sama yang lebih luas terhadap pihak perbankan. Sehingga tidak hanya tiga bank yang terkait dengan PROPER tetapi juga bank lainnya. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah adanya sanksi hukum yang tegas bagi perusahaan yang tidak taat.

Berdasarkan uji simultan yang dilakukan sebagaimana disajikan pada Tabel 4, terbukti bahwa variabel bebas secara bersama-sama dapat mendorong perusahaan pengolahan kelapa sawit di Propinsi Riau untuk melaksanakan PROPER dengan baik. Kelima faktor yang diteliti secara simultan terbukti memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendorong perusahaan memperbaiki kinerja lingkungannya. Adanya penyebaran informasi kinerja lingkungan kepada publik, kemudahan dalam memanfaatkan jasa perbankan, tuntutan

pasar global terhadap produk ramah lingkungan, adanya sanksi hukum bagi yang tidak taat lingkungan, dan komitmen perusahaan secara serentak cukup kuat untuk mempengaruhi perusahaan dalam memperbaiki kinerja lingkungannya. Namun dari kelima variabel tersebut, hanya variabel tuntutan pasar global dan komitmen perusahaan yang dominan mempengaruhi PROPER tersebut.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Iganatius Bondan Suratno, Darsono, Siti Maimunah (2006) dalam Almilialia (2007) yang memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan secara statistik antara kinerja lingkungan (PROPER) dengan pengungkapan lingkungan. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan Sitorus (2010). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengungkapan informasi lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi dengan signifikansi $0,001 < 0,05$.

Berdasarkan uji parsial yang dilakukan, sebagaimana disajikan pada Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa pengumuman peringkat PROPER di media massa saja tidak menjamin untuk dapat mendorong perusahaan pengolahan kelapa sawit dalam meningkatkan kinerja lingkungannya. Walaupun perusahaan menganggap bahwa penyebaran informasi peringkat PROPER di media massa sangat penting, tetapi tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai bentuk insentif/disinsentif reputasi bagi perusahaan, dan menjamin tumbuhnya kepercayaan *stakeholders*. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh KLH bahwa pengumuman peringkat PROPER di media massa secara nasional efektif untuk mendorong perusahaan memperbaiki kinerja lingkungannya. Perusahaan dengan peringkat hijau atau emas diharapkan akan memperoleh citra yang baik di mata publik, sebaliknya perusahaan dengan peringkat merah dan hitam akan mendapat tekanan dari *stakeholders*.

Faktor penyebab tidak signifikannya variabel pengumuman di media massa terhadap kinerja lingkungan diduga karena adanya keterbatasan dalam penelitian ini. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian sebagian besar (32 perusahaan atau 71,11% dari total sampel) adalah perusahaan yang memperoleh peringkat biru. Perusahaan dengan kategori taat (peringkat biru) tidak terpengaruh secara langsung dengan

pemberitaan di media massa dan tidak memperoleh tekanan dari *stakeholders*. Hal ini menjadi koreksi bagi penelitian selanjutnya agar sampel yang dipilih mewakili peringkat yang berbeda.

Beberapa bank yang sudah terhubung dengan penilaian PROPER adalah BNI, Bank Syariah Mandiri dan Bank Danamon (KLH, 2011). Berdasarkan data yang dihimpun peneliti, perusahaan responden paling banyak bekerja sama dengan Bank Mandiri yaitu sejumlah 17 perusahaan (37,8%). Sebagian besar perusahaan juga memiliki bank sendiri yaitu sebanyak 11 perusahaan (24,4%), sedangkan perusahaan yang bekerja sama dengan BCA sebanyak 8 perusahaan (17,8%). Penyebab tidak signifikannya hasil penelitian yang diperoleh kemungkinan disebabkan oleh bank yang digunakan oleh perusahaan sampel bukanlah bank yang terhubung dengan penilaian PROPER tersebut. Oleh karena itu, diharapkan KLH untuk meningkatkan kerja sama dengan pihak perbankan yang lebih luas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, perusahaan sangat peduli terkait kerja sama dengan pihak perbankan. Perusahaan menyadari bahwa jasa perbankan sangat erat kaitannya dengan keberlanjutan usaha. Perusahaan yang akan mengajukan pinjaman ke bank akan berusaha untuk menaati dan menuruti semua persyaratan yang ditetapkan pihak bank. Hal ini sudah terbukti pada proses pinjaman ke bank yang mempersyaratkan dokumen lingkungan. Sehingga perusahaan yang akan mengajukan kredit ke bank wajib melampirkan dokumen lingkungannya.

Kemungkinan lainnya adalah tidak ada regulasi yang mewajibkan bank untuk memberikan pinjaman kepada pelaku usaha yang ramah lingkungan. Surat edaran yang disampaikan oleh BI untuk memanfaatkan PROPER sebagai sumber informasi penilaian resiko lingkungan hanya bersifat himbuan bukan *mandatory*. Sedangkan Peraturan Bank Indonesia No. 7 Tahun 2005 Pasal 10 menyatakan bahwa pihak bank dalam memberikan pinjaman kepada kreditur mempertimbangkan kualitas kreditur berdasarkan faktor penilaian terhadap prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur, dan kemampuan membayar

Berdasarkan data empirik, perusahaan sepakat bahwa konsumen luar negeri sudah mulai mempertimbangkan dan memilih produk yang ramah lingkungan. Konsumen luar negeri bersedia membayar lebih mahal apabila produk atau barang yang dibeli ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan pendapat Junaedi (2005) yang menyatakan bahwa konsumen yang mempunyai kesadaran tinggi terhadap lingkungan akan memilih produk-produk yang ramah lingkungan walaupun harganya relatif lebih mahal.

Konsumen global cenderung lebih kritis dalam memilih produk yang akan dibelinya. Konsumen akan mencari informasi sebanyak mungkin tentang produk tersebut dan bagaimana proses produksinya, serta menerapkan persyaratan yang ketat terhadap mutu produk. Beberapa perusahaan responden menginformasikan bahwa tingginya kabut asap yang terjadi di Propinsi Riau beberapa bulan terakhir ini sangat mengganggu pemasaran produk CPO di luar negeri. Fakta lapangan menunjukkan bahwa banyak CPO yang menumpuk di pelabuhan karena konsumen di negara tujuan protes dengan kondisi asap tersebut. Negara-negara pengimpor seperti Singapur, Hongkong dan beberapa negara di Eropa khawatir bahwa produk CPO yang mereka beli dihasilkan oleh perusahaan yang membakar lahan.

Konsumen juga mengetahui informasi terkait PROPER lewat jaringan internet. Konsumen menganggap bahwa perusahaan dengan peringkat merah dan hitam bermasalah dengan lingkungan atau tidak ramah lingkungan, apalagi peringkat merah atau hitam tersebut disebabkan oleh pengelolaan limbah B3 yang tidak baik.

Perusahaan dengan peringkat merah dua kali berturut-turut pada aspek yang sama atau hitam akan dikenakan sanksi hukum. Yunizon (2010) menyatakan bahwa semestinya hasil akhir dari penilaian PROPER dapat dijadikan petunjuk untuk melihat suatu perusahaan apakah taat atau tidak taat. Perusahaan yang tidak taat, perusahaan dengan peringkat merah atau hitam, dapat menjadi indikasi awal bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Informasi ini sangat membantu aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, untuk segera

melakukan upaya penegakan hukum kepada perusahaan yang mendapat peringkat merah atau hitam karena fakta menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perusahaan beranggapan bahwa komitmen manajemen dalam pengelolaan lingkungan berkaitan erat dengan PROPER. Sebagian perusahaan menyediakan anggaran khusus untuk menerapkan PROPER, sementara sebagian lagi menganggarkan penerapan PROPER dalam divisi *safety, health and environment* (SHE). Sebagian perusahaan sampel memasukkan kinerja lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kaur (2011) yang menyimpulkan bahwa komitmen manajemen dapat meningkatkan kinerja lingkungan secara signifikan dan positif disebabkan adanya sumber daya yang diberikan, anggaran dan pemberian pelatihan di bidang lingkungan.

Tersedianya anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, kesadaran lingkungan yang tinggi dan komitmen pimpinan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan akan mendorong tercapainya kinerja lingkungan yang baik.

Besarnya variasi variabel bebas terhadap variabel terikat ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi R Square (R^2). Hasil analisis statistik menunjukkan nilai R Square sebesar 0,3610 atau 36,1%. Besarnya variasi variabel pengumuman di media massa, faktor perbankan, tuntutan pasar global, sanksi hukum dan komitmen perusahaan untuk menerangkan variabel PROPER sebesar 36,1% sedangkan sisanya 63,9% diterangkan oleh variabel lain.

Yurniwati berpendapat bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan diantaranya faktor lingkungan bisnis eksternal seperti kebijakan pemerintah, kekuatan hukum dan politik, teknologi, sumberdaya, pesaing, selera pelanggan dan pengelolaan perusahaan.

Faktor lain di luar model tersebut kemungkinan juga adalah kewajiban sebagai pemegang izin lingkungan. Perusahaan sebagai pemegang izin lingkungan wajib melaksanakan semua persyaratan dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin lingkungan tersebut.

Sebagai amanat dari UU Nomor 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 27 Tahun 2012 maka setiap pemegang izin lingkungan wajib mengelola dan memantau dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatannya. Kemungkinan faktor lainnya adalah dorongan melalui instrumen lain baik skala internasional maupun nasional seperti *Rountable Sustainability Palm Oil* (RSPO) atau *Indonesian Sustainability Palm Oil* (ISPO), ISO 14001 dan program penataan lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada instansi pemerintah dan perusahaan yang telah berkontribusi serta semua pihak yang membantu dalam melaksanakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, L.S dan Wijayanto D. 2007. Pengaruh *Environmental Performance* dan *Environmental Disclosure* terhadap *Economic Performance*. *Proceedings The 1st Accounting Conference*. Depok 7 – 9 Nopember 2007.
- Ghozali, I. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang : Badan Penerbit : Universitas Diponegoro Semarang.
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2010. Laporan Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prsarana dan Jasa. Jakarta. 89 hal.
- _____, 2011. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (online). www.menlh.go.id diakses tanggal 19 Februari 2013.
- _____, 2013. Petunjuk Teknis PROPER. Jakarta. 131 hal.
- _____, 2014. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta 137 hal.
- Kementerian Pertanian, 2013. Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013. Jakarta. 182 hal.
- Kaur, H. 2011. *Impact of Human Resource Factor on Employee Attitudes : An*

- Emperical Analysis of A Sample of ISO 14001 EMS Companies in Malaysia, Journal of Public Administration and Governance* ISSN 2161-7104, 2011, Vol. 1, 174-196.
- Kasman. 2013. Faktor Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam Penerapan Sistim Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001 di PT. Riau Andalan Pulp and Paper. Program Pascasarjana Universitas Riau. Pekanbaru.
- Sitorus, H.S. 2010. Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Pengungkapan Informasi Lingkungan terhadap Kinerja Ekonomi pada Perusahaan Pertambangan Energi dan Migas yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Bisnis. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Penerbit Alfabeta. Bandung. 540 hal.
- Yunizon, 2010. Implementasi Hukum Pidana Lingkungan dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (Studi Kasus : Kementerian Lingkungan Hidup). Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Islam Riau. Pekanbaru. 148 hal.